



*Jurnal Penelitian*

# POLITIK

Vol.17, No.1, Juni 2020

## PERANG DAN DAMAI: SITUASI POLITIK DI ERA KETIDAKPASTIAN

- Perang Proksi Kontemporer Arab Saudi-Iran  
Sebagai Bentuk Turbulensi Timur Tengah: Sebuah Analisis Geopolitik
- Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War
- Politik Perang dan Perampasan Anggaran Sektor Kesehatan
- Strategi Pertahanan Maritim Indonesia di Tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan
- Tren dan Pemicu Kekerasan Terorganisasi di Asia Tenggara 1989-2018
- Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional
- Penguatan Konektivitas Lintas Batas dalam Kerja Sama Ekonomi Subregional

### REVIEW BUKU

- Inovasi dan Ketidakpastian: Menuju Perspektif Baru Kekuasaan dalam Politik Global

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 17	No. 1	Hlm. 1-158	Jakarta, Juni 2020	ISSN 1829-8001
---------------------------	---------	-------	------------	--------------------	----------------



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Prof. Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dr. Siswanto (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, M.A (*Ahli Gender dan Politik*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (*Ahli Kajian Politik Internasional dan Keamanan*)  
Prof. Dr. Tirta Mursitama (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Dr. Alfitra Salam (*Ahli Kajian Pemilu dan Demokrasi*)  
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepeiluan dan kepartaian*)  
Dr. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI  
Hayati Nufus, S.Hum., LL.M

**Dewan Redaksi**

Dr. Sri Nuryanti (*Ahli Kajian Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Dhurorudin Mashad (*Ahli Kajian Islam dan Timur Tengah*)  
M. Nurhasim, S. IP, M. Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Awani Irewati, M.A (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Sandy Nur Ikfal R, M.Si(Han) (*Ahli Kajian Hubungan Internasional dan Perbatasan*)

**Sekretaris Redaksi**

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si  
Esty Ekawati, M.IP.  
Tri Rainny Syafarani, S.Sos, M.A., M.SE  
Sutan Sorik, S.H.  
Putri Ariza Kristimanta, M.Si.(Han)

**Layouter  
Produksi dan Sirkulasi  
Alamat Redaksi**

Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi  
Adiyatnika, S.Kom  
Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com  
Website: www.politik.lipi.go.id | http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp

**ISSN**

p-: 1829-8001, e: 2502-7476  
Terakreditasi Kemeristek Dikti Nomor 10/E/KPT/2019

## DAFTAR ISI

Daftar Isi		i-ii
Catatan Redaksi		iii-iv
Artikel		
	• <b>Perang Proksi Kontemporer Arab Saudi-Iran Sebagai Bentuk Turbulensi Timur Tengah: Sebuah Analisis Geopolitik</b>	1-16
	<i>Alfin Febrian Basundoro</i>	
	• <b>Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War</b>	17-30
	<i>M. Hamdan Basyar</i>	
	• <b>Politik Perang dan Perampasan Anggaran Sektor Kesehatan</b>	31-58
	<i>Petrus Kanisius Siga Tage</i>	
	• <b>Strategi Pertahanan Maritim Indonesia di Tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan</b>	59-78
	<i>M. Bahtiar Fajri</i>	
	• <b>Tren dan Pemicu Kekerasan Terorganisasi di Asia Tenggara 1989-2018</b>	79-102
	<i>Putri Ariza Kristimanta</i>	
	• <b>Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional</b>	103-116
	<i>Khanisa dan Lidya Christin Sinaga</i>	
	• <b>Penguatan Konektivitas Lintas Batas dalam Kerja Sama Ekonomi Subregional</b>	117-140
	<i>Indriana Kartini, Awani Irewati, Agus R. Rahman, Tri Nuke Pudjiastuti, CPF Luhulima, Rosita Dewi, Sandy Nur Ikfal Raharjo, Hayati Nufus</i>	
Review Buku		
	• <b>Inovasi dan Ketidakpastian: Menuju Perspektif Baru Kekuasaan dalam Politik Global</b>	141-156
	<i>Defbry Margiansyah</i>	
Tentang Penulis		157-158

## CATATAN REDAKSI

Tahun 2020 dibuka dengan kekhawatiran akan pecahnya perang dunia ketiga akibat ketegangan politik global yang kian memanas. Serangan udara Amerika Serikat yang menewaskan Mayor Jenderal Iran Qassem Soleimani memperburuk ketegangan politik di Timur Tengah. Ketegangan di wilayah ini memiliki dampak yang lebih luas dan berpotensi menjadi ancaman bagi pasokan minyak global mengingat negara produsen minyak dunia berada di wilayah konflik ini.

Di sisi lain, meningkatnya ketegangan politik global juga disebabkan oleh persaingan dua kekuatan besar, yaitu Amerika dan Tiongkok. Perang dagang di antara dua negara ini berdampak pada perekonomian dunia. Selain itu, unjuk kekuatan militer kedua negara di wilayah Laut China Selatan juga menjadi ancaman bagi stabilitas di kawasan Asia tenggara. Persaingan antara Amerika dan Tiongkok ini semakin meningkatkan ketidakpastian politik global. Latar belakang kondisi politik internasional di atas mendorong redaksi untuk mengangkat judul “Perang dan Damai: Situasi Politik di Era Ketidakpastian” sebagai tema dalam terbitan *Jurnal Penelitian Politik* Volume 17, No. 1 Tahun 2020. Edisi kali ini menyajikan delapan tulisan yang terdiri dari tujuh artikel ilmiah dan satu naskah review buku.

Artikel pertama berjudul “**Perang Proksi Kontemporer Arab Saudi – Iran Sebagai Bentuk Turbulensi Timur Tengah: Sebuah Analisis Geopolitik**” mengulas tentang dinamika permainan kekuatan di antara dua aktor kunci dalam konflik di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Iran. Dalam memenuhi kepentingannya, kedua negara terlibat dalam perang proksi yang juga melibatkan negara-negara sekutu masing-masing. Dalam tulisan ini Alfin Febrian Basundoro menganalisis strategi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Iran dalam turbulensi yang terjadi di kawasan tersebut.

Artikel kedua yang ditulis oleh M. Hamdan Basyar berjudul “**Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War**”. Tulisan ini memaparkan tahapan-tahapan dan etika perang dalam ajaran Islam. Selain itu, tulisan ini juga menyandingkan pembahasan etika perang dalam Islam dengan teori *just war* untuk lebih memahami makna jihad dan aturan-aturan dalam Islam terkait dengan perang. Melalui analisisnya penulis menemukan bahwa gagasan diskriminasi kombatan dan non-kombatan dalam Islam tidak setara dengan prinsip modern kekebalan non-kombatan.

Dalam artikel ketiga yang berjudul “**Politik Perang dan Perampasan Anggaran Sektor Kesehatan**” dibahas mengenai politik kebijakan anggaran kesehatan di era ketidakpastian. Pertus Kanisius Siga Tage melalui tulisannya mengungkapkan bahwa dalam situasi yang semakin rumit di era ketidakpastiaan, kebijakan terkait anggaran di beberapa negara justru mengabaikan sektor pembiayaan kesehatan dan lebih fokus pada sektor militer dan perang. Politisasi anggaran kesehatan ini perlu dianggap sebagai langkah keliru yang bisa membahayakan peradaban manusia.

Sementara itu, artikel keempat yang ditulis oleh M. Bahtiar Fajri menganalisis tentang strategi pertahanan maritim Indonesia dalam menghadapi dinamika sengketa dan konflik di Laut China Selatan. Artikel berjudul “**Strategi Pertahanan Maritim Indonesia di tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan**” menunjukkan bahwa untuk menghadapi perang hibrida di kawasan Laut China Selatan, Indonesia perlu menyusun dan memperkuat strategi pertahanan maritimnya.

Selain ancaman perang antarnegara, konflik pada level domestik juga turut menjadi ancaman bagi stabilitas di kawasan. Dalam tulisan berjudul “**Tren dan Pemicu Kekerasan Terorganisasi di Asia Tenggara 1989-2018**”

Putri Ariza Kristimanta mengelaborasi tren kekerasan terorganisasi di Asia Tenggara pada rentang waktu 1989-2018. Tulisan ini memaparkan bahwa dalam rentang waktu tersebut jumlah konflik berbasis negara sedikit meningkat, sedangkan konflik non-negara dan kekerasan sepihak justru sedikit menurun. Selain itu, penulis juga mengelaborasi pemicu kekerasan terorganisasi di Asia Tenggara dengan menggunakan Myanmar sebagai contoh.

Di tengah ketidakpastiaan politik global, Indonesia bercita-cita untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Demi mewujudkan cita-cita tersebut, Indonesia perlu memastikan adanya lingkungan strategis yang damai dan stabil. Untuk itu, pembangunan lingkungan yang kondusif serta sinkronisasi antara visi Poros Maritim Dunia dan skema pembangunan maritim di tingkat ASEAN perlu diupayakan. Upaya Indonesia tersebut dipaparkan secara komprehensif oleh Khanisa dan Lidya C. Sinaga dalam artikel berjudul “**Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional**”.

Sinkronisasi tidak hanya diperlukan di antara Indonesia dengan ASEAN. Untuk mendukung pembangunan di wilayah ini, perlu sinergi di antara ASEAN dengan kerja sama ekonomi subregional yang ada di kawasan ini, terutama dalam mendorong pembangunan konektivitas fisik, kelembagaan, dan antarmasyarakat demi mendukung implementasi Komunitas ASEAN yang damai dan sejahtera. Dalam artikel ketujuh yang berjudul “**Penguatan Konektivitas Lintas Batas dalam Kerja Sama Ekonomi Subregional**”, Indriana Kartini dan tim penulis menganalisis strategi pemanfaatan sinergi antara kerja sama ekonomi subregional dengan ASEAN untuk pembangunan konektivitas Indonesia, terutama di wilayah perbatasan.

Selain tujuh artikel di atas, penerbitan kali ini juga memuat review buku yang ditulis oleh Defbry Margiansyah dengan judul “**Inovasi dan Ketidakpastian: Menuju Perspektif Baru Kekuasaan dalam Politik Global**”. Ketidakpastian seringkali dilihat sebagai komponen difusi kekuasaan dalam

studi hubungan internasional. Buku karya Peter J. Katzenstein dan Lucia A. Seybert yang berjudul *Protean Power: Exploring the Uncertain and Unexpected in World Politics* melengkapi perspektif kekuasaan tersebut dalam menjelaskan dinamika politik global kontemporer. Dalam review buku ini Defbry juga mengkritisi analisis konseptual yang telah dilakukan oleh Katzenstein dan Seybert dengan merekonstruksi deskripsi konsep yang lebih operatif dalam menjelaskan kompleksitas dinamika kekuasaan dalam politik global.

Pada akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah berkontribusi hingga terbitnya *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini, khususnya para penulis, mitra bestari, dewan redaksi, dan tim pengelola jurnal. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini dapat memberikan manfaat dan memperkaya kajian mengenai dinamika keamanan dan politik internasional.

Selamat membaca.

**Redaksi**

# STRATEGI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DI TENGAH DINAMIKA PERANG HIBRIDA KAWASAN LAUT CHINA SELATAN

## *INDONESIA MARITIME DEFENSE STRATEGY TOWARD HYBRID WARFARE IN SOUTH CHINA SEA*

**M. Bahtiar Fajri**

Universitas Pertahanan  
Komplek Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Jawa Barat  
E-mail: 10020084024.fajri@gmail.com

Diterima: 20 Maret 2020; direvisi: 9 April 2020; disetujui: 26 Juni 2020

### **Abstract**

*The dynamics of the strategic environment in the South China Sea (SCS) continue to change in time. Indonesia, which explicitly declares as non-claimant state, is becoming part of the dispute. The claimant-states that fight for their rights in the SCS created an unconventional war in the form of hybrid warfare. This research focuses on how the dynamics of hybrid warfare in the SCS and how Indonesia's defense strategy to counter this new type of warfare. This study took data from various literary sources and then analyzed them using strategic environmental factors and the interests of the claimant-states that were associated with geopolitics and geostrategic perspectives. The results show that hybrid warfare does indeed occur in a variety of forms so that Indonesia should develop and strengthen its maritime defense strategy and create main capability by restructuring the ministries and institutions based on Military, Politic, Economy, Civil, and Information. This strategy is very dependent on the strength of escalation and the use of military power in the disputed area. This strategy also requires further study if there is influence of nuclear weapons from one of the claimant-states.*

**Keywords:** *Indonesia Maritime Strategy, Hybrid Warfare, South China Sea Dispute*

### **Abstrak**

Dinamika lingkungan strategis di kawasan Laut China Selatan (LCS) terus mengalami perubahan. Dampaknya, Indonesia yang secara tegas mendeklarasikan dirinya sebagai *non-claimant states* turut dalam arena persengketaan. Upaya *claimant-states* (negara pihak) dalam merebutkan hak di LCS menciptakan sebuah perang *unconventional* yang dinamakan peperangan hibrida. Penelitian ini berfokus pada dinamika perang hibrida di kawasan LCS dan bagaimana strategi pertahanan Indonesia untuk menangkal jenis peperangan ini. Penelitian ini mengambil data dari berbagai sumber literatur kemudian dianalisis menggunakan faktor lingkungan strategis dan kepentingan *claimant-states* yang dihubungkan dengan kondisi geopolitik dan geostrategis yang berkembang di kawasan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peperangan hibrida memang benar-benar terjadi dengan berbagai macam bentuknya. Cara yang tepat bagi Indonesia untuk menangkalnya adalah dengan menyusun dan memperkuat strategi pertahanan maritimnya dan membentuk komponen utama melalui restrukturisasi K/L berdasarkan Militer, Politik, Ekonomi, Sipil, dan Informasi (MPESI). Strategi ini sangat bergantung pada kekuatan eskalasi dan penggunaan kekuatan militer negara di wilayah sengketa. Strategi ini juga memerlukan kajian lebih lanjut apabila terdapat pengaruh penggunaan senjata nuklir dari salah satu negara yang bersengketa.

**Kata Kunci :** Strategi Maritim Indonesia, Peperangan Hibrida, Sengketa Laut China Selatan

## Pendahuluan

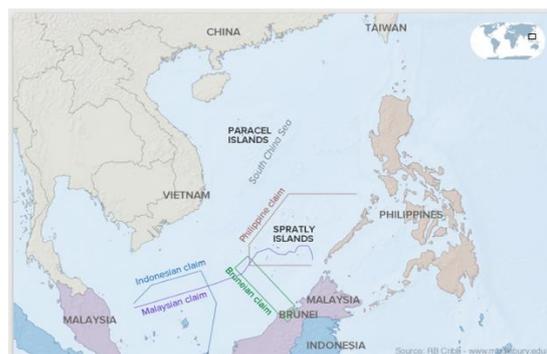
Laut China Selatan (LCS) merupakan wilayah yang vital bagi Indonesia karena memainkan banyak instrumen dan spektrum, seperti kedaulatan, ekonomi, politik, dan militer. Dalam hal kedaulatan, terdapat beberapa negara yang mengklaim teritorialnya di LCS. Dalam hal ekonomi, LCS mengandung kekayaan sumber daya alam (SDA) yang besar dengan potensi jalur pelayaran yang menguntungkan bagi siapa saja yang menguasainya. Dalam urusan politik, LCS menjadi obyek kebijakan strategis yang mampu mempengaruhi dinamika kawasan. Sementara itu, militer memainkan urusan pertahanan kedaulatan negara yang sering terjadi gesekan antar negara pihak.

Letak yang strategis dengan keuntungan SDA yang melimpah menambah daya pikat berkumpulnya para aktor untuk saling berkompetisi. Di balik indahnya daya tarik tersebut, terdapat potensi masalah yang berujung pada meningkatnya ketegangan dan situasi yang membahayakan. Oleh karena itu, permainan dengan penuh strategi dan taktik menjadikan LCS sebagai medan baru peperangan modern abad ke-21<sup>1</sup>.

Melihat pemainnya, aktor yang bermain masih didominasi oleh *state actor* atau negara. Mereka saling mempersengkatakan wilayah atau teritori di LCS. Beberapa negara yang bersengketa di antaranya Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam<sup>2</sup>. Sengketa antarnegara ini dapat menjadi sumber masalah yang mampu menyebabkan dinamika tensi panas dan dingin di kawasan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kesepakatan bersama tentang perbatasan wilayah di LCS.

<sup>1</sup> Gewirtz, P., *Limits of Law in the South China Sea, East Asia Policy Paper 8*. (Washington, D.C: Brookings, 2016).

<sup>2</sup> Cobus, P., "Konflik dan Diplomasi di Laut, Voice of America", 2019, <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>, diakses pada 8 Maret 2020.



**Gambar 1.** Laut China Selatan

Sumber Gambar: ABC (2015)<sup>3</sup>

Tiongkok dan negara-negara yang bersengketa lainnya memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan. Kondisi yang penuh ketidakpastiaan membuat masalah LCS dapat menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak. Untuk menghindari eskalasi yang semakin tinggi dan meningkatnya ketegangan, setiap negara yang bersengketa harus saling menahan diri dengan tidak menggunakan kekuatan militer dan mengedepankan diplomasi. Baik negosiasi maupun pertemuan-pertemuan bilateral, dan multilateral harus terus digalakkan sebagai jalan damai penyelesaian sengketa di LCS. ASEAN dan Tiongkok ingin mendorong lahirnya *Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea*, yang sudah di cetuskan pada tahun 2002<sup>4</sup>. Selanjutnya, pada Juni 2019, *code of conduct* (COC) sedang diupayakan para negara pihak dalam KTT ASEAN-China meskipun belum ditemukan jalan tengahnya<sup>5</sup>. Dampaknya, masing-masing negara masih terus melakukan aktivitas dan agendanya di

<sup>3</sup> ABC, "South China Sea dispute: John Kerry says US will not accept restrictions on movements in the sea", 7 Agustus 2015, <https://www.abc.net.au/news/2015-08-06/kerry-says-us-will-not-accept-restrictions-in-south-china-sea/6679060?nw=0>, diakses pada 11 Juni 2020.

<sup>4</sup> Ganewati, W., "Masa Depan ASEAN: Tantangan dan Peran Indonesia," dalam Lidyia Christin Sinaga, Khanisa, Faudzan Farhana, dan Pandu Prayoga (eds.), *50 Tahun ASEAN: Dinamika dan Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: LIPI Press, 2019), hlm. 232.

<sup>5</sup> Quang, N. M., "Saving the China-ASEAN South China Sea Code of Conduct", 29 Juni 2019, <https://thediplomat.com/2019/06/saving-the-china-asean-south-china-sea-code-of-conduct/>, diakses pada 8 Maret 2020.

LCS. Cara seperti ini mereka gunakan sebagai bentuk klaim atas wilayah mereka. Contohnya, penolakan Tiongkok terhadap keputusan *UN Permanent Court of Arbitration* atas wilayah Scarborough milik Filipina<sup>6</sup>. Selain Tiongkok, Vietnam juga melakukan aksi yang hampir serupa. Kapal *coast guard* Vietnam sering mengawal kapal nelayannya untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan ilegal yang berujung pada pergesekan antarnegara<sup>7</sup>.

Kondisi di atas menunjukkan adanya aktivitas yang berkaitan dengan perebutan wilayah di LCS. Perebutan wilayah sengketa dengan tidak melibatkan kekuatan militer bisa jadi merupakan bentuk perang *unconventional* yang perlu dikaji lebih mendalam agar dapat diketahui jenis perang apa yang sedang terjadi dan cara melawannya menurut perspektif Indonesia. Melihat karakteristik perang yang terjadi, konflik di LCS lebih condong tergolong dalam peperangan hibrida meskipun terdapat fitur-fitur lain yang masuk dalam jenis perang lainnya. Peperangan hibrida secara sederhana dapat diartikan sebagai perang dengan menggunakan dua sumber daya atau lebih yang dipadukan sedemikian rupa menjadi satu jenis peperangan baru hingga memiliki kekuatan yang luar biasa. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa kekuatan untuk mengintervensi salah satu negara pihak. Contohnya, kekuatan besar ekonomi Tiongkok yang dapat mempengaruhi Filipina untuk berbagi SDA di wilayah sengketa<sup>8</sup>. Kekuatan yang lebih superior ini dimanfaatkan oleh salah satu pihak tertentu terhadap lawan<sup>9</sup>. Oleh karena

<sup>6</sup> Permanent Court of Arbitration, "The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China)", 2016, <https://pca-cpa.org/en/cases/7/>, diakses pada 16 Maret 2020.

<sup>7</sup> Reuters, "Indonesia and Vietnam vessels collide in South China Sea, 12 detained", 29 April 2019, <https://www.abc.net.au/news/2019-04-30/indonesia-and-vietnam-ships-collide-in-south-china-sea/11056752>, diakses pada 5 April 2020.

<sup>8</sup> Raissa Robles, "Officials from Philippines, China to meet on stalled South China Sea joint oil exploration deal: senator", 7 Januari 2020, <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3045050/officials-philippines-china-meet-stalled-south-china-sea-joint>, diakses pada 3 April 2020.

<sup>9</sup> Toto S, "Diskusi Panel Serial (DPS) bertajuk: Pertahanan Non Militer," Jakarta Convention

itu, perang hibrida sendiri terjadi tanpa disadari oleh lawannya karena bentuknya yang penuh dengan ambiguitas.

Indonesia bukanlah negara yang bersengketa, akan tetapi dihadapkan pada permainan besar dan tantangan dalam mempertahankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan dengan LCS<sup>10</sup>. Kondisi ini menyebabkan Indonesia terpaksa masuk kedalam arena peperangan hibrida.

Peperangan hibrida ini dapat memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung<sup>11</sup>. Seperti contoh, Indonesia beberapa kali bergesekan dengan negara tetangga karena masalah pelanggaran perbatasan. Masalah seperti ini diprediksi tidak akan selesai sebelum tercipta suatu pembagian wilayah yang disepakati bersama dengan dasar hukum internasional yang berlaku. Kondisi seperti ini yang membuat keamanan dan kedaulatan Indonesia terganggu. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana proses peperangan hibrida terbentuk serta dampaknya bagi Indonesia. Tulisan ini juga memaparkan strategi pertahanan maritim Indonesia yang tepat guna menangkal serangan peperangan hibrida yang berkembang di LCS. Hasil yang diharapkan adalah membantu pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan strategi pertahanan guna menangkal segala bentuk ancaman di masa yang akan datang.

Center. 2016 Narasumber diskusi yang diprakarsai Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI) tersebut antara lain, Sesjen Wantanas Letjen TNI Nugroho Widyotomo yang diwakili oleh Mayor Jenderal Toto Siswanto, Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Wijoyo, Ketua Umum PPAD Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri.

<sup>10</sup> Khanisa, "Pembangunan Maritim Indonesia," dalam Khanisa dan Faudzan Farhana, *Keamanan Maritim ASEAN Dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2018), hlm. 8.

<sup>11</sup> Mangkuto SW, "Bukan Cuma RI, Laut Malaysia s/d Vietnam juga diklaim China, CNBC Indonesia", 7 Januari 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200107085224-4-128148/bukan-cumari-laut-malaysia-s-d-vietnam-juga-diklaim-china>, diakses pada 8 Maret 2020.

## Peperangan Hibrida

Peperangan era abad ke-21 saat ini sudah mengalami transformasi. Konsep perang yang dulunya banyak didasarkan pada pemikiran Clausewitz sudah mengalami perubahan. Seiring dengan dinamika yang terjadi pasca-Perang Dunia II dan pengembangan senjata nuklir, bentuk peperangan tidak lagi konvensional. Beberapa konsep baru muncul sebagai bentuk peperangan era *post-Clausewitzian*, salah satunya adalah perang hibrida. Konsep perang hibrida pertama kali muncul pada tesis William J. Nemeth yang berjudul: *'Future War and Chechnya: A Case for Hybrid Warfare'* tahun 2002<sup>12</sup>. Banyak ahli baik dari kalangan akademisi maupun praktisi masih kesulitan dalam memahami konsep perang hibrida ini. Pada tahun 2017 *The International Consensus on 'Hybrid Warfare'* yang dihadiri oleh *North Atlantic Treaty Organization (NATO)* dan *European Union (EU)* secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak dapat menjelaskan secara pasti apa itu perang hibrida, akan tetapi mereka sepakat bahwa itu adalah sebuah permasalahan<sup>13</sup>. Perang hibrida secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sinkronisasi penggunaan beberapa instrumen kekuatan untuk menyerang spektrum kerentanan suatu negara dalam mencapai kepentingan strategisnya<sup>14</sup>. John J. McCuen memberikan definisi perang hibrida sebagai perang dengan spektrum penuh, baik secara fisik maupun konseptual, untuk mengintervensi negara tertentu<sup>15</sup>. Salah satu karakteristik dari perang hibrida ini adalah tidak melibatkannya kekuatan militer secara langsung. Operasi yang dilakukan adalah mendesain sebuah serangan dengan mengeksploitasi kerentanan negara serta menggabungkan pengaruh kekuatan

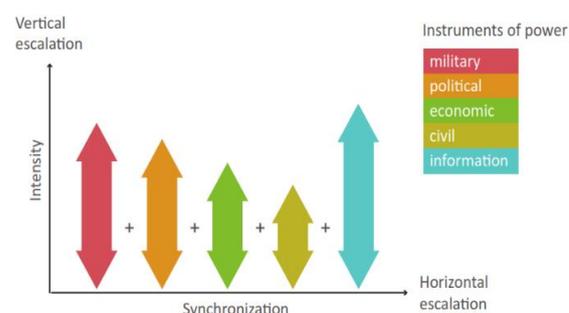
<sup>12</sup> William J. Nemeth, "Future War and Chechnya: A Case for Hybrid Warfare," *Master Thesis*, (California: Naval Postgraduate School Monterey, 2002).

<sup>13</sup> Patrick J.C, Erik R.K, *MCDC Countering Hybrid Warfare Project: Understanding Hybrid Warfare*, (Norway: MOD, 2017), hlm. 3.

<sup>14</sup> Patrick J.C, Erik R.K, *MCDC Countering Hybrid Warfare Project: Understanding Hybrid Warfare*, (Norway: MOD, 2017), hlm. 7.

<sup>15</sup> John J. McCuen, "Hybrid Wars," *Military Review* vol. 88 (2008): hlm. 108.

Militer, Politik, Ekonomi, Sipil, dan Informasi (MPESI) menjadi sebuah kekuatan militer yang sebenarnya. MPESI dapat disinkronisasikan untuk menjadi kekuatan yang bereskalasi secara vertikal ataupun horizontal. Artinya, setiap instrumen ditingkatkan spektrum kekuatannya ataupun digabungkan dengan instrumen kekuatan lainnya. Sinkronisasi kekuatan instrument dijelaskan dalam Gambar 2.



**Gambar 2.** Eskalasi Peperangan Hibrida

Sumber: MCDC (2017)<sup>16</sup>

Memahami bentuk perang Hibrida sangatlah penting agar negara dapat mengetahui apakah sedang diserang atau tidak, mengingat sifat dari perang Hibrida adalah sangat rahasia dan penuh dengan ambiguitas. Oleh karena itu, penting mengetahui karakteristik dari perang Hibrida, yakni sebagai berikut.

1. Menggunakan seperangkat instrument alat MPESI yang lebih luas dan teknik yang tidak berbentuk ancaman tradisional.
2. Menargetkan kerentanan sosial yang sama sekali tidak diperkirakan dan dipikirkan sebelumnya.
3. Sinkronisasi setiap instrumen agar dapat bereskalasi menjadi sebuah serangan nonmiliter yang mematikan.
4. Mengeksploitasi sisi ambiguitas, kreatifitas, dan unsur yang tak kasat mata. Hal ini untuk mencegah pengaruh deteksi negara target.
5. Tidak akan tampak secara langsung karena efeknya akan terlihat saat negara tersebut sudah dalam kerusakan.

<sup>16</sup> Patrick J.C, Erik R.K, *MCDC Countering Hybrid Warfare Project: Understanding Hybrid Warfare*, (Norway: MOD, 2017), hlm. 9.

Karakteristik perang hibrida tersebut menunjukkan bahwa bentuknya sangat sulit untuk dideteksi. Perang hibrida merepresentasikan percampuran segala macam bentuk taktik dan strategi. Kasus aneksasi yang dilakukan Rusia di Crimea dan Ukraina, misalnya, dapat menjadi contoh kasus untuk mengetahui cara kerja perang hibrida secara lebih jelas. Rusia mampu melihat kerentanan yang ada di negara Ukraina, berupa lemahnya fundamental ekonomi makro dan tingginya pinjaman luar negeri. Upaya yang dilakukan Rusia berupa memberikan bantuan suplai gas dan diikuti dengan kontrak antar-ke dua negara. Rusia juga memberikan struktur pinjaman murah kepada Ukraina. Hal ini berdampak pada tekanan politik Ukraina dari Rusia untuk membatalkan beberapa perjanjian penting Asosiasi Ukraina-EU. Saat kondisi dalam negeri yang semakin tidak terkendali, Rusia mengirimkan tentaranya, 'The Green Man,' yakni tentara yang berpakaian sipil dan dipersenjatai untuk melawan Pemerintah Ukraina<sup>17</sup>. Keberhasilan aneksasi Rusia ini tidak lepas dari keberhasilan taktik dan strategi perang Hibrida yang dipraktikkan Rusia.

## Lingkungan Strategis Kawasan Laut China Selatan

Panggung besar perebutan eksistensi di kawasan LCS memunculkan banyak isu yang memengaruhi kepentingan nasional masing-masing negara, khususnya Indonesia. Lingkungan strategis (lingstra) adalah kondisi dan cara pandang negara dalam melihat sebuah masalah atau isu yang berkembang yang berpengaruh terhadap kebijakan strategis negara<sup>18</sup>.

LCS merupakan kawasan yang sangat strategis bagi banyak negara sehingga Indonesia tidak boleh melewati lingstra yang berkembang di kawasan.

<sup>17</sup> Alexander Lanoszka, "Russian Hybrid Warfare and Extended Deterrence in Eastern Europe," *International Affairs* 92, 1 (2016): hlm 175-195.

<sup>18</sup> Kemhan, "Perkembangan Lingkungan Strategis Dan Prediksi Ancaman Tahun 2008," (Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Analisa Lingkungan Strategis, 2008).

Kawasan dengan potensi yang strategis tentunya membutuhkan kebijakan strategis pula. Negara yang tidak mampu meramu kebijakan strategisnya di kawasan ini akan kehilangan kepentingan strategisnya pula. Kondisi lingstra yang berkembang di kawasan di antaranya adalah ekonomi yang saling ketergantungan antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok<sup>19</sup>. Tiongkok menjadi salah satu negara pihak yang mampu memanfaatkan kondisi ini hingga membuatnya lebih leluasa beraktivitas di wilayah sengketa<sup>20</sup>. Tiongkok terlihat begitu bebas dalam membangun dan memperbesar pangkalan militernya di Kepulauan Spratly dan Paracel<sup>21</sup>. Kegiatan ini tentunya terlarang karena pulau-pulau yang disengketakan masih berstatus quo. Dampak lainnya adalah meningkatkan ketegangan di antara negara yang bersengketa dan *arms race* di kawasan. Misalnya, Filipina membeli dan memperbarui persenjataan militernya dari Rusia pada tahun 2019<sup>22</sup>. Di sisi lain, Vietnam juga memperkuat kekuatan dan kapabilitas militernya dengan meningkatkan anggaran pertahanan dari tahun 2003. Vietnam banyak membeli kapal petarung dan kapal selam terbaru dari Amerika Serikat (AS), Rusia, dan India. Pembangunan kekuatan militer ini hanya dipergunakan untuk mengimbangi dominasi Tiongkok di LCS<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> Ratna S.I, "Dinamika Hubungan Ekonomi Asean-China," dalam Lidya Christine Sinaga (ed.), *Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara*, (Jakarta: LIPI Press, 2013), hlm. 27-56.

<sup>20</sup> Meidi K, "Conflicts in the South China Sea and China-ASEAN Economic Interdependence: A Challenge to Cooperation," *ASEAN-Canada Working Paper Series no. 7* (2014), hlm. 1.

<sup>21</sup> Hannah B, "China's Sea Control Is a Done Deal, 'Short of War With the U.S'", 20 September 2018, <https://www.nytimes.com/2018/09/20/world/asia/south-china-sea-navy.html>, diakses pada 5 April 2020.

<sup>22</sup> Mogato, "Philippines, Russia Sign Two Military Deals", 25 Oktober 2017, <https://de.reuters.com/article/us-philippines-russia-defence/philippines-russia-sign-two-military-deals-idUSKBN1CU1K6>, diakses pada 8 Maret 2020.

<sup>23</sup> Manoj Joshi, "Vietnam Will Never be for India What Pakistan is to China", 3 September 2016, <https://thewire.in/63871/vietnam-will-never-india-pakistan-china/>, diakses pada 8 Maret 2020.

Apa yang terjadi sekarang, khususnya di LCS, sulit untuk diprediksi. Seperti halnya pemikiran beberapa pakar hubungan internasional. Mereka saling berdebat akan teori realisme yang tidak mampu menjelaskan kondisi di LCS. Mereka menyetujui bahwa hal ini dipengaruhi oleh identitas negara ASEAN yang tidak menganggap Tiongkok sebagai ancaman bagi mereka. Begitu juga sebaliknya, Tiongkok juga tidak akan mengancam negara-negara ASEAN. Dalam hal hegemoni di kawasan, Tiongkok sudah mendapatkan restu dari negara ASEAN untuk menjadi negara besar yang memberikan perlawanan terhadap hegemoni AS. Tidak mengejutkan apabila ketegangan di antara negara yang bersengketa di LCS tidak akan berujung pada penyelesaian melalui jalur militer<sup>24</sup>.

Lingstra yang berkembang di kawasan kerap kali muncul dari intervensi AS terhadap kebijakan Tiongkok di LCS. Hal ini dapat dilihat bagaimana AS sangat proaktif menentang kebijakan Tiongkok di LCS<sup>25</sup>. Negara-negara Asia Tenggara sebenarnya lebih merasa terancam dengan kehadiran pangkalan militer AS di kawasan dibandingkan dengan Tiongkok. Kepentingan AS yang menempatkan pangkalannya di kawasan Asia Timur dan Tenggara tentunya berkaitan dengan *nation-building* AS. Selain untuk menekan Korea Utara (Korut) dalam proyek denuklirisasi, juga untuk mengimbangi Tiongkok dan melindungi sekutunya<sup>26</sup>. Secara militer Tiongkok belum mampu mengimbangi kekuatan AS<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> David C K, *China Rising: Peace, Power, And Order in East Asia*. (New York: Columbia, 2007), hlm. 12-25.

<sup>25</sup> US Department of Defense, *Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense*, (Washington: The Secretary of Defense, 2012), hlm. 4-6.

<sup>26</sup> Evans J. R. Revere, "U.S. Interests and Strategic Goals in East Asia and the Pacific, Archive US Department of State", 2 Maret 2005, <https://2001-2009.state.gov/p/eap/rls/rm/2005/42900.htm>, diakses pada 8 Maret 2020.

<sup>27</sup> Anthony H, Cordesman, Hess A, and Yarosh N.S, *Chinese Military Modernization and Force Development A Western Perspective*, (Washington: The Center for Strategic and International Studies, 2013), hlm. 8-27.

Namun, kenyataan berkata lain, kekuatan pengaruh Tiongkok ternyata mampu mengimbangi pengaruh AS di kawasan. Hal ini terlihat dari berubahnya kebijakan politik luar negeri Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada tahun 2016 yang mengumumkan *separation* atau pemisahan dari AS. Dukungan tersebut ditandai dengan 13 kerjasama bilateral dengan Tiongkok<sup>28</sup>. Akibatnya, Filipina enggan meneruskan kerja sama lebih dalam dengan AS<sup>29</sup>. Meskipun kondisi ini di tengah perselisihan dengan Tiongkok terkait masalah LCS, Filipina lebih memilih melakukan negosiasi dan lebih mementingkan kepentingan bersama.

Dua kekuatan besar di kawasan LCS ini menimbulkan dinamika persaingan kedua negara baik Tiongkok maupun AS. Mereka terus mencari pengaruh dan dukungan di kawasan demi kepentingannya masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan AS yang siap memberikan bantuan kekuatan militer saat Indonesia mengalami ketegangan dengan Tiongkok di LCS<sup>30</sup>. Bantuan ini bukanlah semata bentuk dukungan saja, melainkan usaha AS untuk meraih simpati dari Indonesia. AS sangat membutuhkan dukungan dari negara-negara ASEAN di kawasan untuk mempertahankan hegemoninya.

Kompetisi antara kedua negara besar ini nyatanya memberikan dampak positif pula. Keseimbangan akan muncul dan memberikan kondisi damai di kawasan<sup>31</sup> sehingga negara-

<sup>28</sup> Parameswaran P, "The Limits of Duterte's US-China Rebalance", 24 Oktober 2016, <http://thediplomat.com/2016/10/the-limits-of-dutertes-us-china-rebalance/>, diakses pada minggu 8 Maret 2020.

<sup>29</sup> Gutierrez. J, Gibbons-Neff, T. Schmitt, E., "Philippines Tells U.S. It Will End Military Cooperation Deal", 11 Februari 2020, <https://www.nytimes.com/2020/02/11/world/asia/philippines-united-states-duterte.html>, diakses pada Minggu 8 Maret 2020.

<sup>30</sup> Hasan R.A, "Menhan AS: Kami Siap Bantu RI di Laut China Selatan dan Natuna", 23 Januari 2018, <https://www.liputan6.com/global/read/3235768/menhan-as-kami-siap-bantu-ri-di-laut-china-selatan-dan-natuna>, diakses pada 8 Maret 2020.

<sup>31</sup> Yunus S, "Penyeimbang' di Laut China Selatan", 28 November 2011, <https://majalah.tempo.co/read/internasional/138350/penyeimbang-di-laut-cina-selatan?>, diakses pada 9 Maret 2020.

negara kecil dan berkembang juga dapat hidup aman tanpa adanya tekanan dari salah satu negara hegemon. Kondisi damai di kawasan tidak hanya tercipta karena keseimbangan dari Tiongkok dan AS saja, melainkan juga dari kerja sama negara-negara ASEAN yang solid dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara<sup>32</sup>. Negara anggota ASEAN sepakat untuk menyelesaikan seluruh masalah persengketaan dengan cara perundingan. Kebijakan bersama ini tentunya memberikan efek yang besar bagi negara kecil, seperti Brunei Darussalam. Mengukur kekuatannya yang tidak berimbang, Brunei Darussalam menjadi begitu pasif dan diam serta menyerahkan semua masalah terhadap kesepakatan bersama ASEAN dan hukum internasional yang berlaku<sup>33</sup>. Bukan hal yang mustahil karena Brunei Darussalam adalah negara kecil yang tidak akan mampu memberikan perlawanan dari segala lini, baik ekonomi, militer, dan politik.

Negara-negara ASEAN sangat memahami identitas masing-masing negara anggota sehingga untuk bisa bertahan di tengah dinamika lingkungan strategis kawasan ASEAN, mereka harus menguatkan kerja samanya. Itulah jalan satu-satunya untuk menciptakan perdamaian dan kestabilan keamanan di kawasan.

## Agresifitas Serangan Nelayan Asing

Isu atau berita yang muncul dari berbagai sumber media cetak dan elektronik terkait pelanggaran nelayan asing seperti tiada henti. Bukan tanpa alasan hal tersebut terjadi karena pelanggaran dengan melibatkan aktifitas nelayan ini sudah terjadi dari beberapa dekade lalu. Menurut arsip berita *Kompas*, tercatat dari tahun 1960-an sudah banyak nelayan asing dari Jepang, Taiwan, dan Malaysia yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> Kembara G, "Partnership for Peace in the South China Sea," *The CSIS Working Paper Series WPSINT* – 02 (2018), hlm. 3-6.

<sup>33</sup> Khoury E, "Recent Trends In The South China Sea Disputes," *Asia Focus* no. 16 (2017), hlm 7.

<sup>34</sup> Nugroho R.S, "Sejak Kapan Nelayan Asin Marak Curi Ikan di Laut Indonesia?", 4 Januari 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/114356265/sejak-kapan-nelayan->

Nelayan yang tertangkap sering kali mengatakan bahwa mereka masih di dalam wilayahnya. Hal ini sangatlah berbahaya karena klaim mereka berarti pengakuan kedaulatan atas wilayahnya. Strategi ini sudah dipraktikkan oleh Tiongkok di LCS. Seperti *China Coast Guard* (CCG) yang mendampingi nelayannya dalam menangkap ikan<sup>35</sup>. Berdasarkan apa yang dilakukan Tiongkok tersebut, penulis berasumsi bahwa strategi ini mempunyai beberapa alasan. Pertama, Tiongkok ingin membuktikan bahwa Laut Natuna Utara adalah bagian dari wilayahnya berdasarkan klaim *Nine-Dash Line*. Kedua, Tiongkok mempunyai hak atas segala sumber daya alam (SDA) yang ada di sana. Ketiga, Tiongkok ingin mengetahui respon Indonesia di Natuna. Strategi ini adalah cara yang *soft* karena menggunakan kapal penjaga pantai. CCG sendiri merupakan bagian pasukan paramiliter di bawah institusi Kepolisian Tiongkok<sup>36</sup>. Strategi ini tidak hanya dilakukan di wilayah Indonesia saja, akan tetapi juga dilakukan di perairan Vietnam, Malaysia, dan Filipina<sup>37</sup>. Pendampingan kapal nelayan ke garis depan merupakan salah satu ambisi Tiongkok dalam memenangkan perang hibrida ini<sup>38</sup>.

Nelayan yang melakukan aktifitas kelautan seperti menangkap ikan sering bersinggungan dengan otoritas negara tertentu. Kesalahan nelayan dalam bernavigasi tentunya hal yang wajar dikarenakan kondisi laut yang tidak memiliki perbatasan jelas, tetapi berbeda jika

[asing-marak-curi-ikan-di-laut-indonesia?page=all](https://www.kompas.com/asing-marak-curi-ikan-di-laut-indonesia?page=all), diakses pada 9 Maret 2020.

<sup>35</sup> BBC, "Kapal ikan asing masuk Natuna: Indonesia protes keras ke Beijing dan kapal Vietnam baru saja ditangkap," 30 Desember 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50925653>, diakses pada 9 Maret 2020.

<sup>36</sup> Office Of The Secretary Of Defense, *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China*, (Washington: Department of Defense, 2019), hlm. 18.

<sup>37</sup> Chinh G, "Vietnam repels Chinese-flagged vessels for illegally fishing in its waters", 9 April 2019, <https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-repels-chinese-flagged-vessels-for-illegally-fishing-in-its-waters-3906574.html>, diakses pada 10 Maret 2020.

<sup>38</sup> Reed J, "South China Sea: Fishing on the front line of Beijing's ambitions", 24 Januari 2019, <https://www.ft.com/content/fead89da-1a4e-11e9-9e64-d150b3105d21>, diakses pada 9 Maret 2020.

kesalahan tersebut dilakukan berulang kali. Hukuman yang tegas dan membuat jera nyatanya tidak mampu menghentikan arus pelanggaran ini. Alasan yang paling klasik adalah Natuna kaya akan hasil ikan<sup>39</sup>.

Kegiatan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan asing merupakan salah satu upaya negara tertentu dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Bagi nelayan, tentu mereka ingin hidup lebih sejahtera, sedangkan bagi negara yang bersangkutan, mendapatkan keuntungan hasil tangkapan ikan dan sukarelawan garis depan. Keadaan seperti itu tentu membahayakan karena sudah bersinggungan dengan urusan geopolitik dan geostrategis suatu negara. Nelayan asing yang melakukan pelanggaran dapat mengetahui informasi strategis kekuatan penjagaan perbatasan laut. Kondisi ini akan berbeda jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh sebuah kapal negara (KN) atau kapal milik pemerintah lainnya. Penggunaan KN sangat berisiko meningkatkan ketegangan yang telah disepakati dalam ASEAN *Summit on South China Sea*<sup>40</sup>. Oleh karena itu, nelayan asing dapat diartikan sebagai sumber informasi penting yang mampu melakukan spionase kedalam wilayah pertahanan musuh.

Agresifitas serangan nelayan asing yang memasuki wilayah ZEE Indonesia bukanlah tanpa alasan. Pelanggaran yang dilakukan nelayan asing tersebut dapat diartikan sebagai bentuk perang hibrida yang berkembang di kawasan LCS. Perang hibrida dengan strategi pengiriman nelayan sipil perlu dijadikan perhatian khusus mengingat mereka bisa keluar masuk perbatasan dengan leluasa. Kebijakan pemerintah dalam hal pemberantasan pelanggaran nelayan asing perlu diperjelas dan dipertegas. Pelemahan terhadap hukuman yang membuat jera pelanggar nelayan tersebut dapat juga diartikan sebagai pelemahan pertahanan

<sup>39</sup> Nugroho A, "Ikan dan Migas Berlimpah, Laut Natuna Jadi Rebutan China dan Indonesia", 9 Januari 2020, <https://www.kompas.tv/article/62327/produksi-ikan-dan-migas-berlimpah-natuna-jadi-daya-tarik-asing>, diakses pada 10 Maret 2020.

<sup>40</sup> Valencia M.J, "The ASEAN Summits and the South China Sea", 31 Juli 2017, <https://thediplomat.com/2017/07/the-asean-summits-and-the-south-china-sea/>, diakses pada 10 Maret 2020.

laut Indonesia<sup>41</sup>. Seperti eksekusi hukuman penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP). Hukuman ini dinilai efektif karena mampu mengurangi angka pelanggaran *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di perairan Indonesia<sup>42</sup>. Selanjutnya, kebijakan ini dihentikan mengikuti pergantian kabinet pemerintahan Indonesia<sup>43</sup>. Selain itu, pembangunan pangkalan TNI di wilayah Natuna yang telah diresmikan pada 18 Desember 2019 dapat berfungsi sebagai *deterrence effect* atau pencegahan<sup>44</sup>. Penambahan kekuatan pertahanan di wilayah Natuna tersebut juga memberikan dampak baik terhadap pelanggaran nelayan asing dan upaya *counter-spionage*.

## Penguasaan Wilayah Sengketa

Persengketaan wilayah di kawasan LCS masih terus berlangsung. Manuver yang dilakukan negara pihak sangat agresif dan intensif, seperti yang dilakukan oleh Vietnam. Untuk mempertahankan wilayah yang diklaim oleh Tiongkok, Vietnam melakukan pengeboran minyak dan gas di wilayah Hakuryu 5 dan Blok 06-01<sup>45</sup>. Aktifitas pengeboran ini sangat ditentang Tiongkok karena dianggap melakukan

<sup>41</sup> Gideon A, "Menteri Susi Kembali Tenggelamkan 13 Kapal Asing Pencuri Ikan", 12 Mei 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3963901/menteri-susi-kembali-tenggelamkan-13-kapal-asing-pencuri-ikan>, diakses pada 10 Maret 2020.

<sup>42</sup> Ilma N, "Peri Laut: Kembalikan Kejayaan Laut Nusantara," dalam Umi N, Ilma N, Raja HP, dan Febrina P (eds), *Mina Bahari: Illegal Fishing No More...! Komitmen Serius Pemerintah Perangi Illegal Fishing*, (Jakarta: Pusdatin Sekjen KKP, 2015), hlm. 62-66.

<sup>43</sup> Sambhi A.N, "Legacies, Lessons And Lobsters: Indonesia's Maritime Policy In A Post-Susi World", 15 Januari 2020, <https://amti.csis.org/legacies-lessons-and-lobsters-indonesias-maritime-policy-in-a-post-susi-world/>, diakses pada 10 Maret 2020.

<sup>44</sup> Evan Laksmana, "Why Indonesia's New Natuna Base is not about Deterring China", 25 Januari 2019, <https://amti.csis.org/indonesias-natuna-base-not-about-deterring-china/>, diakses pada 16 Maret 2020.

<sup>45</sup> AMTI, "China Risks Flare-up Over Malaysian, Vietnamese Gas Resources", 13 Desember 2019, <https://amti.csis.org/china-risks-flare-up-over-malaysian-vietnamese-gas-resources/>, diakses pada 3 Februari 2020.

kegiatan eksplorasi di wilayahnya. Vietnam lantas tidak gentar menghadapi kecaman Tiongkok tersebut dengan kembali melakukan pengeboran di area sekitar Blok 06-01 dengan berkolaborasi perusahaan Rosneft asal Rusia. Perlawanan Tiongkok untuk mengganggu aktivitas tersebut adalah dengan mengirimkan kapal survei dan *coast guard* di sekitar area pengeboran. Untuk menyaingi Vietnam, Tiongkok juga melakukan pencarian sumber minyak yang berdekatan dengan Blok 06-02 Vietnam.



**Gambar 3.** Kapal Tiongkok *Stand-off* di Blok Hakuryu 5

Sumber: CSIS/AMTI (2019)<sup>46</sup>

Gangguan ini tidak hanya dilakukan terhadap Vietnam, melainkan juga Malaysia. Tiongkok melakukan hal yang sama dengan mengepung Blok SK 308 dan Pantai Sarawak yang masuk dalam pengeboran Sapura Esperanza. Baik Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia sama-sama aktif dalam melakukan aksi-aksi klaim untuk mempertegas wilayah kedaulatan wilayah mereka<sup>47</sup>.

Diplomasi yang berbeda ditunjukkan oleh Filipina. Mengikuti perubahan arah kebijakan luar negeri Presiden Duterte, Filipina sekarang lebih condong berpihak pada Tiongkok. Hal ini terlihat pada keputusan Presiden Duterte yang membatalkan perjanjian *Philippine-U.S.*

<sup>46</sup> AMTI, "China Risks Flare-up Over Malaysian, Vietnamese Gas Resources", 13 Desember 2019, <https://amti.csis.org/china-risks-flare-up-over-malaysian-vietnamese-gas-resources/>, diakses pada 3 Februari 2020

<sup>47</sup> AMTI, "China Risks Flare-up Over Malaysian, Vietnamese Gas Resources", 13 Desember 2019, <https://amti.csis.org/china-risks-flare-up-over-malaysian-vietnamese-gas-resources/>, diakses pada 03 Februari 2020.

*Visiting Forces Agreement* (VFA) yang sudah berlangsung selama 20 tahun<sup>48</sup>.

Dalam melakukan eksplorasi minyak dan gas di wilayah sengketa, Filipina dan Tiongkok sepakat untuk melakukan kerja sama pengeboran minyak dibawah kerja sama *The China-Philippines Inter-Governmental Joint Steering Committee on Cooperation on Oil and Gas Development* yang diketuai oleh kementerian luar negeri dan *Inter-Entrepreneurial Working Group on Oil and Gas Development*<sup>49</sup>. Kerja sama tersebut menyatakan bahwa hasil eksplorasi akan dijual ke Filipina sebagai bentuk ketahanan energi dengan bagi hasil 60 Filipina dan 40 Tiongkok.

Berbeda dengan negara-negara di atas, Indonesia lebih mandiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Natuna. Indonesia mempercayakan pembangunan dan pengeksplorasian SDA di Natuna kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta<sup>50</sup>. Indonesia memperkirakan jumlah kandungan minyak di Natuna 4 kali lebih besar daripada Blok Masela. Oleh karena itu, pembangunan pengilangan minyak harus dilakukan segera sebagai bentuk hak negara berdaulat.

Upaya negara-negara yang bersengketa di LCS dan Indonesia menunjukkan bahwa mereka mempunyai hak untuk melakukan pengelolaan SDA di wilayahnya. Menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), negara pantai berhak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk melakukan

<sup>48</sup> Castro RCD, "Duterte's Decision To Scrap The Vfa: Whimsical Or Insidious?", 11 Februari 2020, <https://amti.csis.org/dutertes-decision-to-scrap-the-vfa-whimsical-or-insidious/>, diakses pada 10 Maret 2020.

<sup>49</sup> Robles R, "Officials from Philippines, China to meet on stalled South China Sea joint oil exploration deal: senator". 7 Januari 2020, <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3045050/officials-philippines-china-meet-stalled-south-china-sea-joint>, diakses pada 10 Maret 2020.

<sup>50</sup> Karunia A.M, "Tahun Ini Pertamina Mulai Lakukan Pengeboran Minyak di Blok East Natuna", 9 Januari 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/155624826/tahun-ini-pertamina-mulai-lakukan-engeboran-minyak-di-blok-east-natuna?page=all>, diakses pada 10 Maret 2020.

pengelolaan SDA<sup>51</sup>. Pengelolaan sumber daya alam di wilayah kedaulatan dapat dikatakan sebagai sebuah *settlement* atau pendudukan atas hak penuh wilayahnya sendiri.

Aksi *stand-off* yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam merupakan salah satu bentuk perang hibrida. Para aktor saling melakukan intimidasi terhadap lawannya<sup>52</sup>. Taktik seperti ini mampu membuat ketegangan meningkat, yang menyebabkan perang hibrida tidak terhindarkan. Meskipun demikian, masing-masing negara harus tetap menjaga kaidah pertemanan di tengah sengketa yang sedang terjadi, sehingga hubungan baik yang sudah terjalin sejak lama dan saling menguntungkan tetap berlanjut tanpa adanya konflik yang lebih besar.

## Pembangunan dan Pengembangan Pulau Buatan

Upaya perebutan wilayah dan saling klaim kedaulatan sudah membentuk sebuah perang hibrida yang begitu kompleks. Tidak hanya itu, pembangunan kekuatan pertahanan militer sebagai upaya *deterrence effect* atau pencegahan adalah ranah strategis. Pembangunan kekuatan tersebut tidak hanya untuk menunjukkan eksistensi dan klaim suatu wilayah, melainkan untuk pembangunan kekuatan pertahanan. Seperti Tiongkok yang dalam kurun waktu 2012–2018 telah berhasil membangun pulau buatan dan memfungsikannya sebagai pangkalan militer<sup>53</sup>.

Masalah utama yang terjadi adalah pembangunan pulau buatan ini berada dalam kawasan yang berstatus quo. Selain melanggar hukum internasional, juga dapat mengeskalasi

ketegangan. Terdapat beberapa alasan yang mampu menjelaskan kepentingan Tiongkok dalam membangun pulau buatan tersebut. Pertama, pengakuan kedaulatan atas wilayah di LCS. *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) telah mengamati dan mendokumentasikan seluruh aktifitas Tiongkok di LCS. Pengamatan ini mulai dari persengketaan perebutan pulau hingga pembangunannya. CSIS melihat bahwa tujuan pembangunan pulau buatan tersebut adalah salah satu upaya Tiongkok untuk mendeklarasikan kedaulatan<sup>54</sup>. Hal ini didukung dengan pemanfaatan pulau buatan tersebut untuk kepentingan pertahanan. Tiongkok membangun pulau-pulau tersebut menjadi pangkalan militer sehingga membuat negara tetangga merasa terancam. Menurut buku putih pertahanan Tiongkok tahun 2019, disebutkan bahwa pulau-pulau yang ada di LCS adalah bagian dari teritori Tiongkok dan akan terus dilakukan patroli rutin di wilayah tersebut<sup>55</sup>.

Kedua, Tiongkok berusaha untuk mendesak penduduk sekitar semakin tergeser. Seperti yang terjadi pada penduduk Pulau Thitu. Masyarakat pulau Thitu adalah penduduk asli Filipina. Akan tetapi urusan administratifnya diatur oleh Tiongkok. Tidak hanya itu, Tiongkok juga telah membangun Subi Reef milik Filipina menjadi pulau baru dan melarang penduduk sekitar pulau mengunjungi pulau tersebut<sup>56</sup>.

Tidak kalah, Vietnam juga membuat pulau buatan di sekitar kepulauan Spratly. Sedikit berbeda dengan Tiongkok, tujuan dari Vietnam adalah untuk mengimbangi kapabilitas pulau buatan Tiongkok<sup>57</sup>. Kemampuan pembangunan

<sup>51</sup> United Nation, "Part V: Exclusive Economic Zone," *UNCLOS* (1982).

<sup>52</sup> Jennings R, "China-Vietnam Maritime Standoff: 3 Scenarios for the Next Stage", 23 Agustus 2019, <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/china-vietnam-maritime-standoff-3-scenarios-next-stage>, diakses pada 10 Maret 2020.

<sup>53</sup> Stashwick S, "Argument: China's South China Sea Militarization Has Peaked", 19 Agustus 2019, <https://foreignpolicy.com/2019/08/19/chinas-south-china-sea-militarization-has-peaked/>, diakses pada 11 Maret 2020.

<sup>54</sup> CSIS, "Signaling Sovereignty: Chinese Patrols At Contested Reef", 26 September 2019, <https://amti.csis.org/signaling-sovereignty-chinese-patrols-at-contested-reefs/>, diakses pada 7 Maret 2020.

<sup>55</sup> The State Council Information Office of the People's Republic of China, *China's National Defense in the New Era*, (Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2019), hlm. 7.

<sup>56</sup> CSIS, "Confirming the Chinese Flotilla Near Thitu Island", 17 Agustus 2017, <https://amti.csis.org/confirming-chinese-flotilla-near-thitu-island/>, diakses pada 7 Maret 2020.

<sup>57</sup> CSIS, "Updated: Vietnam Responds With Spratly Air Upgrades", 15 November 2016, <https://amti.csis.org/vietnam-responds/>, diakses pada 7 Maret

pulau yang dilakukan Vietnam pun berbeda dengan Tiongkok. Vietnam hanya mampu meng-*upgrade* pulau berpenduduk dengan memperbesar ukuran landasan pacu dan membangun sebagian pulau reklamasi di sekitar karang bawah lautnya.

Ketiga, Tiongkok menginginkan dunia melihatnya. Jauh sebelum pembangunan pulau buatan tersebut, Tiongkok pada tahun 1951 sudah membuat pakta perdamaian dengan Jepang yang berisi kedaulatan penuh terhadap kepulauan Spratly dan Paracel<sup>58</sup>. Seiring berjalannya waktu, kepentingan Tiongkok tersebut mengalami banyak kendala dan sempat ditanggguhkan dalam mengembangkan wilayah tersebut. Setelah pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang semakin besar, perluasan kepentingan di LCS kembali digalakkan sehingga pembangunan pulau buatan tersebut memperkuat kehadiran Tiongkok terhadap pulau-pulau yang ada di Spratly dan Paracel.



**Gambar 4.** Pulau milik Vietnam: Sebelum dan Sesudah

Sumber: CSIS/AMTI Digital Globe (2017)<sup>57</sup>



**P. Woody Sebelum dan Sesudah (Tiongkok)**

2020.

<sup>58</sup> Zhou Enlai, *Zhou Enlai's Selected Works on Diplomacy*, (Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 1990), hlm. 40.



**P. Duncan: Sebelum dan Sesudah (Tiongkok)**



**P. Tree: Sebelum dan sesudah (Tiongkok)**

**Gambar 5.** Klaim Pulau Buatan oleh Tiongkok

Sumber: CSIS/AMTI Digital Globe (2017)<sup>59</sup>

## Strategi Pertahanan Maritim Indonesia

Perang Hibrida yang berlangsung di LCS memang tidak bisa terhindarkan lagi. Indonesia yang memiliki wilayah perbatasan laut dengan LCS terpaksa mengikuti panggung yang bukan arenanya. Doktrin pertahanan yang *defensive* mengharuskan Indonesia mempertahankan kedaulatan NKRI atas invasi asing. Indonesia memiliki alat pertahanan negara berupa Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI sebagai komponen utama pertahanan bertugas menjaga kedaulatan NKRI<sup>60</sup>. TNI harus menyadari akan adanya perang hibrida yang sedang terjadi. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa kondisi lingkungan strategis di kawasan LCS sangatlah dinamis dan memungkinkan eskalasi bisa terjadi. Oleh karena itu, diperlukan

<sup>59</sup> CSIS/AMTI Digital Globe, "Update: China's Continuing Reclamation In The Paracels", 9 Agustus 2017, <https://amti.csis.org/paracels-beijings-other-buildup/>, diakses pada 7 Maret 2020.

<sup>60</sup> Bambang K, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang: Tentara Nasional Indonesia*. (Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004).

sebuah strategi yang tepat guna menangkal serangan jenis tersebut.

Ide dasar dari serangan dan pertahanan adalah letak sumber kekuatan. Di mana terdapat area vital dan strategis, di sanalah pusat serangan yang lebih besar. Oleh karena itu, pertahanan di dalam obyek vital strategis ini harus lebih besar. Bentuk serangan terkuat adalah serangan yang berhasil menduduki wilayah terminal pelabuhan, dan membangun blokade terhadap laju ekonomi negara. Oleh karena itu, Natuna tidak dibangun sebagai kota pelabuhan-perdagangan, dan lebih bermanfaat untuk fungsi pertahanan.

Dalam strategi pertahanan laut atau maritim, kekuatan pertahanan maritim sangatlah diperlukan. Apapun kondisinya, tanpa adanya kekuatan pertahanan Indonesia tidak akan mampu bertahan ataupun menyerang agresi kapal musuh. Setidaknya jika Indonesia tidak mampu untuk melakukan penyerangan, maka Indonesia dapat melakukan pertahanan. Bertahan adalah cara paling efektif mengamankan kedaulatan wilayah dengan cara *counter-attack* di wilayah perairan laut. Bertahan adalah bentuk terkuat dari sebuah pertarungan dibandingkan dengan serangan.

Salah satu keuntungan dari bertahan adalah menunda sebuah keputusan. Seperti yang kita tahu bahwa menyerang musuh membutuhkan perhitungan taktik dan strategi yang sangat teliti dan penuh dengan perhitungan. Setidaknya bertahan mampu membuat musuh membuat sebuah keputusan yang sulit<sup>61</sup>. Konsep bertahan ini didukung dengan kemampuan *Minimum Essential of Force* (MEF) yang sudah dirancang dari tahun 2010<sup>62</sup>. Bertahan bukan berarti bersikap pasif, akan tetapi sebagai bentuk dari negosiasi peperangan.

Strategi pertahanan maritim memerlukan komando laut<sup>63</sup>. Tugas dari komando laut bukanlah untuk menaklukkan wilayah laut

atau menginvasi tepi pantai wilayah musuh. Komando laut memiliki tugas utama dalam mengontrol komunikasi maritim, baik untuk kepentingan komersial maupun militer. Penguasaan komunikasi laut ini memberikan batasan, larangan, dan hak kepada siapapun yang berlayar di wilayah komando. Penguasaan ini dapat berupa otoritas penuh atas properti publik dan swasta di atas laut. Otoritas seperti ini kelihatannya terlalu berlebihan dan melanggar kebebasan hak milik. Akan tetapi, kekuatan negara yang berdaulat adalah mempunyai hak penuh membuat aturannya sendiri.

Operasi komando laut juga berarti mengamankannya. Mempertahankan laut memang penting, tetapi mempertahankan komando laut dari serangan musuh juga harus diperhatikan. Jika Indonesia mampu menguasai komunikasi komando laut di wilayah kedaulatan Natuna, maka dapat dipastikan Indonesia menguasai wilayah ini sepenuhnya.

Dalam strategi pertahanan maritim yang *defensive*, Indonesia akan lebih banyak melakukan observasi atau pengamatan. Kapabilitas terkuat adalah menggabungkan antara kemampuan bertahan dan menyerang. Bertahan lebih mudah dilakukan untuk tindakan pencegahan. Strategi peperangan maritim bukanlah sebuah perang laut untuk menghancurkan armada kapal musuh. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mencegah pasukan musuh melewati laut teritorial dan melindungi kapal-kapal kita dalam melakukan patroli laut. Angkatan laut dapat melakukan apa saja di laut untuk mengintervensi musuh sebagai bentuk supremasi komando laut.

Ada beberapa strategi dalam pertahanan maritim yang dapat diterapkan. Pertama, kecepatan kejutan serangan musuh harus diimbangi dengan kesiapan kecepatan intelijen. Kedua, kecepatan konvoi serangan kapal musuh harus diimbangi dengan kecepatan dan mobilitas kapal dengan kapal cepat. Ketiga, adanya kesiapan kapal dengan daya hancur terhadap serangan kejutan. Keempat, kecepatan armada musuh harus diimbangi dengan armada yang cepat pula. Oleh karena itu, untuk bertahan dari serangan kita harus siap saat diserang baik kesiapan personel maupun fasilitas.

<sup>61</sup> Clausewitz CV, *The Strategic Collection: The Art of War, On War, The Prince*. Edited and Translated by Michael Howard and Peter Paret, (New Jersey: Princeton University Press, 1989), hlm 213-230.

<sup>62</sup> Yusiantoro P, *Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama*, (Jakarta: Permenhan, 2012).

<sup>63</sup> Corbett J.S, *Principle of Maritime Strategy*, (New York: Dover Publications Inc, 2004), hlm. 383-432.

Menentukan kekuatan sangatlah penting untuk menyusun sebuah kebijakan strategis. Seperti apa yang sudah terjadi pada Perang Dingin tahun 1988 ketika Presiden Reagan membuat perjanjian dengan Uni Soviet untuk mengurangi jumlah misil *medium-range* di Eropa<sup>64</sup>. Kebijakan ini diambil karena kedua negara telah mengukur kapabilitas kekuatan militernya yang hampir seimbang, sehingga kebijakan pertahanan kala itu lebih cenderung bertahan meskipun eskalasi untuk menyerang juga ada.

Mengukur kekuatan militer negara yang bersengketa di LCS sangat penting untuk dilakukan. Pertimbangan tersebut dapat dijadikan rumusan kebijakan untuk menentukan strategi pertahanan maritim yang tepat. Kekuatan militer negara yang bersengketa tidak bisa dianggap remeh. Tiongkok dalam dekade terakhir terus meningkatkan kapabilitas kekuatan militernya. Berdasarkan laporan *CSIS Brief*, Tiongkok saat ini sedang mengembangkan alutsista pesawat tanpa awak dan kapal tanpa awak. Tidak hanya itu, Tiongkok juga mengembangkan misil jarak jauh ICBM dan SLBM<sup>65</sup>. Hal ini diikuti oleh Vietnam yang meningkatkan anggaran pertahanan setiap tahunnya dan Filipina yang sudah membeli beberapa alutsista dari Rusia. Tabel 1 menggambarkan kapabilitas kekuatan masing-masing negara yang bersengketa di LCS:

**Tabel 1.** Kapabilitas Kekuatan Militer Negara-Negara yang bersengketa di LCS

NO	POWER	CHINA	INDONESIA	VIETNAM	MALAYSIA	FILIPINA	
1	Budget	Anggaran Pertahanan	\$237 M	\$7.6 M	\$5 M	\$4 M	\$4 M
		Tentara Aktif	2,183,000	400,000	482,000	110,000	125,000
2	Pasukan	Tentara Cadangan	510,000	400,000	5,000,000	300,000	180,000
		Total personel	2,693,000	800,000	5,482,000	410,000	305,000
3	Angkatan Udara	Fighter	1,232	41	77	26	0
		Pesawat Serang	371	39	0	13	19
		pesawat Angkut	224	54	38	18	23
		Pesawat Pelatih	314	109	36	40	24
		Pesawat Misi-Khusus	111	5	4	4	8
		Helikopter	911	177	138	65	97
		Heli Serang	281	16	25	0	0
		Tank	3,500	313	2,615	74	7
		Kendaraan lapis baja	33,000	1,178	2,530	1,387	513
		Artillery Swa-Gerak	3,800	153	70	0	0
4	Angkatan Darat	Artillery Tarik	3,600	366	1,000	211	286
		Roket Projector	2,650	36	85	54	0
		Aircraft Carriers	2	0	0	0	0
		Destroyer	36	0	0	0	0
5	Angkatan Laut	Frigates	52	7	9	6	2
		Corvettes	50	24	14	6	1
		Kapal Selam	74	5	6	2	0
		Kapal Patroli	220	156	26	41	76
		Penghancur Ranjau	29	10	8	4	0

Sumber: Annual GFP Review (2020)<sup>66</sup>

Berdasarkan data Tabel 1, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan kekuatan militer dan kapabilitas militer yang sangat jauh berbeda. Kemampuan militer Tiongkok begitu hegemon dibandingkan dengan negara lainnya. Keunggulan kekuatan militer Tiongkok ini membuatnya cenderung lebih *offensive* dibandingkan yang lain. Di samping itu, Tiongkok juga merupakan negara yang memiliki senjata nuklir. Kekuatan senjata nuklir Tiongkok dapat dijadikan sebagai alat untuk memperkuat kekuatan sistem pertahanan baik *offensive* maupun *defensive*<sup>67</sup>. Dalam hal *offensive*, nuklir berguna untuk memperkuat pengaruh, mengintimidasi, atau mendominasi negara lain yang lebih lemah. Tiongkok memang sangat aktif dalam melakukan manuver di LCS dan terkadang menggunakan kekuatan militernya, akan tetapi tidak untuk kekuatan nuklirnya. Tiongkok tidak menggunakan kekuatan

<sup>64</sup> Medhurst, Martin J, *Cold War Rhetoric: Strategy, Metaphor, and Ideology*, (East Lansing, Michigan: Michigan State University Press, 1997), hlm. 60-63.

<sup>65</sup> Ian W, Masao D, *More Than Missiles: China Previews its New Way of War*, (Washington: CSIS Briefs, 2019), hlm. 1-6.

<sup>66</sup> GFP, "2020 Military Strength Ranking", 1 Januari 2020, <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp>, diakses pada 12 Maret 2020.

<sup>67</sup> Edwards A.J.C, *Nuclear Weapons, The Balance of Terror, The Quest for Peace*, (New York: State University of New York Press, 1986), hlm 129-132.

nuklirnya untuk melakukan intimidasi ataupun pengaruhnya dalam sengketa LCS. Dalam upaya yang *offensive* di LCS, Tiongkok lebih banyak menggunakan strategi perang hibrida dan jenis perang lainnya. Nuklir Tiongkok hanya digunakan sebagai *deterrence effect* dan strategi pertahanan *defensive* yang ditujukan untuk AS yang menguasai kawasan Asia Pasifik<sup>68</sup>. Melihat dampak kerusakan yang diakibatkan membuat perang hibrida dengan melibatkan pengaruh senjata nuklir bukanlah sebuah cara yang tepat untuk memenangkan peperangan hibrida di LCS. Oleh karena itu, kekuatan nuklir tidak dijadikan pedoman dan instrumen dalam perang hibrida yang berlangsung di LCS.

## Strategi Pertahanan Menangkal Peperangan Hibrida Laut China Selatan

Indonesia memiliki suatu sistem pertahanan negara dengan nama Sistem Pertahanan Kemanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Sistem pertahanan ini sudah disahkan dan diperkuat dengan Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 7 Ayat 3 menjelaskan bahwa dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa<sup>69</sup>.

Bentuk perang hibrida yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: agresifitas serangan nelayan asing, penguasaan wilayah sengketa, dan pembangunan pulau buatan. Dari beberapa bentuk peperangan hibrida tersebut masih terdapat bentuk lainnya mengingat penggunaan sumber daya yang beraneka ragam.

<sup>68</sup> Ahyar A, "Parade Dongfeng 41, Senjata Nuklir China Paling Ditakuti AS", 6 Oktober 2019, <https://akuratnews.com/parade-dongfeng-41-senjata-nuklir-china-paling-ditakuti-as/>, diakses pada 13 Maret 2020.

<sup>69</sup> Bambang K, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*, (Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2002), hlm.5.

Perang Hibrida merupakan perang yang memadukan banyak instrumen, seperti militer, politik, ekonomi, sipil, dan informasi. Oleh karena itu, cara untuk menangkalnya adalah dengan memperkuat instrumen yang menjadi objek serangan lawan. Ancaman perang hibrida merupakan jenis ancaman nonmiliter. Contohnya, apabila instrumen yang diserang adalah ekonomi, maka cara yang paling tepat adalah menguatkan kekuatan ekonomi dalam negeri sehingga garda terdepan dalam menangkai serangan hibrida ini adalah melibatkan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Apabila dibandingkan, kekuatan ekonomi Indonesia dengan negara pihak yang bersengketa di LCS masih tergolong kuat. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Indonesia menjadi anggota negara G20<sup>70</sup>. Satu-satunya negara pihak yang dapat mempengaruhinya adalah Tiongkok. Selain keanggotaannya di G20, Tiongkok juga masuk dalam keanggotaan WTO. Kekuatan ekonomi Tiongkok mampu memberikan kerentanan terhadap ekonomi domestik AS. Dengan demikian, ekonomi Tiongkok juga akan mampu memberikan pengaruhnya pada negara di kawasan, termasuk Indonesia<sup>71</sup>.

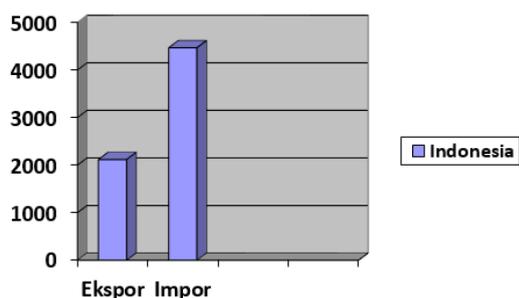
Mengingat adanya potensi ancaman ekonomi dari Tiongkok, Indonesia harus melakukan tindakan antisipasi terhadap serangan ekonomi Tiongkok. Ancaman ekonomi Tiongkok bukanlah hal yang baru. Ketergantungan ekonomi Indonesia sudah terlihat dari dua dekade terakhir semenjak RI menandatangani perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) tahun 2001. Tidak hanya Indonesia, ancaman ketergantungan terhadap ekonomi Tiongkok juga dirasakan oleh negara-negara anggota ASEAN<sup>72</sup>. Oleh karena itu, untuk menghadapinya, ASEAN membentuk

<sup>70</sup> G-20, *The Group Of Twenty: A History*, (South Africa: Western cape, 2007), hlm. 8.

<sup>71</sup> Wing Thye Woo, "What are the legitimate worries about China's WTO membership?," dalam Ligang Song (ed), *Dilemmas of China's Growth in the Twenty-First Century*, (Canberra: ANU E Press, 2012), hlm. 11-25.

<sup>72</sup> Latif A dan Siwage D.N, "Asean-China Free Trade Agreement: Tantangan Dan Peluang Bagi Indonesia", *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Edisi XXVI no.1 (2010), hlm. 2-4.

kawasan ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*)<sup>73</sup>.



**Gambar 6.** Kekuatan Ekspor-Impor Indonesia terhadap Tiongkok

Sumber: BPS (2019)<sup>74</sup>

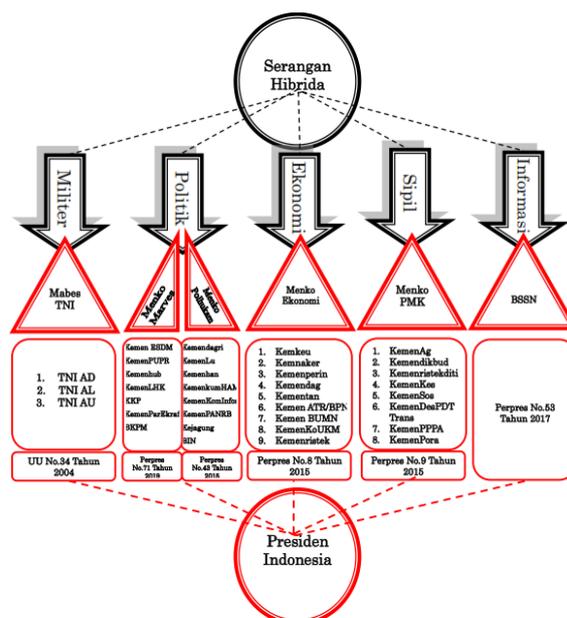
Melihat grafik perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok pada Gambar 6, terlihat bahwa angka impor lebih besar dari angka ekspor. Dapat disimpulkan bahwa ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap ekonomi Tiongkok masih tinggi. Kondisi ini dapat dicontohkan pada saat musibah pandemi Covid-19 yang menimpa Tiongkok. Harga kebutuhan bahan pokok seperti bawang putih langsung mengalami kenaikan yang signifikan<sup>75</sup>. Ketergantungan ekonomi Indonesia harus terus diturunkan agar kesenjangan pengaruh Tiongkok dapat berkurang.

Komponen utama dalam strategi pertahanan menangkal serangan hibrida memang belum dibentuk baik secara legal maupun struktural. Apabila terdapat ancaman hibrida dengan memperhatikan instrumen MPESI, maka acuan yang dipakai adalah UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Oleh karena itu, ilustrasi susunan kompenan utama yang memungkinkan untuk dijadikan garda terdepan melawan serangan peperangan Hibrida adalah sebagai berikut.

<sup>73</sup> Latif A dan Siwage D.N, "Asean-China Free Trade Agreement: Tantangan Dan Peluang Bagi Indonesia", *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Edisi XXVI no.1 (2010), hlm. 2-4.

<sup>74</sup> BPS RI, *Statistik Perdagangan Luar Negeri Foreign Trade Statistical Buletin Ekspor-Impor*, (Jakarta: Pt Citra Mawana Patamaro, 2019), hlm. 15.

<sup>75</sup> Tirta Citradi, "Harga Bawang Putih Impor Terbang, Negara Corona?", 17 Februari 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200217153948-4-138432/harga-bawang-putih-impor-terbang-gegar-corona>, diakses pada 4 April 2020.

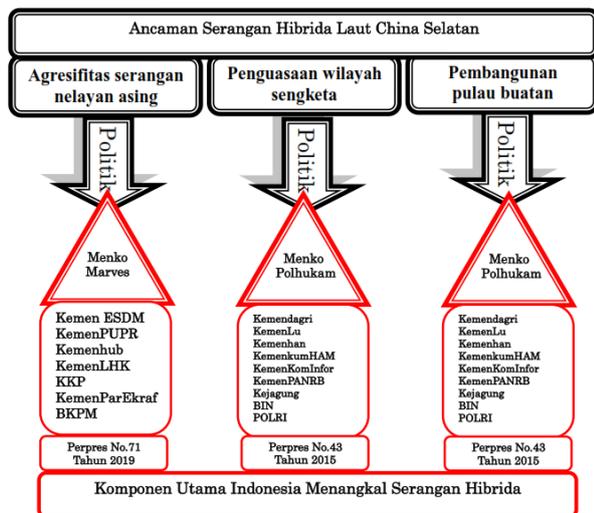


**Gambar 7.** Strategi Pertahanan Hibrida Indonesia

Sumber: Diolah dari berbagai sumber hukum Indonesia<sup>76</sup>

Jika strategi pertahanan melawan serangan hibrida di atas telah dirumuskan, maka akan mudah melakukan penangkalan terhadap bentuk perang hibrida yang berkembang di LCS. Bentuk ancaman hibrida yang berkembang di LCS berdasarkan kajian sebelumnya adalah agresifitas serangan nelayan asing, penguasaan wilayah sengketa, dan pembangunan pulau buatan. Ketiga ancaman tersebut dikelompokkan ke dalam instrumen politik, sehingga komponen utama dalam menangkal peperangan hibrida tersebut adalah menggunakan Perpres No. 43 tahun 2015 atau Perpres No. 71 Tahun 2019. Pimpinan komando yang berwenang adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Kemenko Polhukam) atau Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) yang didukung oleh seluruh komponen sumber daya yang dimiliki berdasarkan strategi pertahanan rakyat semesta. Contohnya, apabila bentuk serangan hibrida berupa serangan nelayan asing, maka serangan ini tergolong ke dalam instrumen politik yang mencakup wilayah keamanan maritim sehingga untuk menangkalnya adalah tugas Kemenko Marves.

<sup>76</sup> MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012).



**Gambar 8.** Ilustrasi Strategi Pertahanan Menangkal Serangan Hibrida LCS

Sumber: Diolah dari berbagai sumber hukum<sup>77</sup>

Dalam menangkal serangan hibrida, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang dapat dijadikan pijakan dalam membentuk kekuatan struktural. Kapabilitas yang dimiliki juga mampu untuk menahan serangan dari berbagai sisi. Melihat apa yang sudah diilustrasikan dalam Gambar 8, diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang sering terjadi, seperti tidak mampunya instansi terkait melihat potensi ancaman tersebut dan mengkoordinasikannya dengan K/L terkait.

## Penutup

Dinamika lingkungan strategis di kawasan LCS terus mengalami perubahan dengan cepat. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya pergesekan dan pertarungan kepentingan demi merebutkan wilayah klaim LCS. Wilayah yang strategis dengan mengandung miliaran barel minyak dan gas menjadikan LCS begitu menarik untuk dikuasai. Di samping itu, kekayaan maritim berupa melimpahnya jumlah ikan menambah pergolakan dan keikutsertaan sipil untuk bertarung dalam masalah persengketaan. LCS benar-benar menjadi sebuah panggung besar perebutan kekuasaan dan kekayaan. Negara-negara yang menyatakan dirinya berhak

<sup>77</sup> MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012).

atas wilayah tersebut atau *claimant states* terus menerus melakukan manuver politik, ekonomi, militer, dan segala bentuk pengaruhnya di kawasan.

Aktor utama dalam sengketa LCS ini masih didominasi oleh negara. Mereka menggunakan cara, taktik, dan segala macam strategi untuk mendominasi dari yang lain. Penggunaan segala bentuk cara ini menciptakan sebuah kontestasi peperangan hibrida. Perang hibrida sendiri dapat diartikan sebagai sinkronisasi penggunaan beberapa kekuatan instrument untuk menyerang spektrum kerentanan suatu negara dalam mencapai kepentingan strategisnya. Apa yang terjadi sekarang di LCS dapat diartikan sebagai serangan hibrida yang sengaja dilancarkan oleh negara tertentu yang Indonesia sendiri tidak menyadarinya. Oleh sebab itu, mengamati dinamika lingkungan strategis adalah salah satu cara untuk mengetahui bentuk perang hibrida yang terjadi di LCS dan pengaruhnya untuk Indonesia.

Berdasarkan kajian dan pembahasan di atas, dapat ditemukan beberapa bentuk peperangan hibrida di antaranya konspirasi pembangunan pulau buatan, pendudukan wilayah sengketa, pengiriman nelayan asing, dan pengembangan kegiatan eksplorasi. Peperangan hibrida tersebut menyeret Indonesia ke dalam perang yang bukan arenanya. Kebijakan politik dalam negeri, luar negeri dan pertahanan menjadi kebijakan yang sangat strategis guna menangkal segala bentuk upaya peperangan hibrida.

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki perbatasan langsung dengan LCS. Gejolak dan tensi yang berkembang di LCS mengharuskan Indonesia membuat strategi pertahanan maritim yang tepat untuk menghadapi serangan perang hibrida.

Dalam pertahanan maritim untuk menjaga objek vital strategis, Indonesia dapat memperkuat kapabilitas kekuatan pertahanan maritimnya seperti memperkuat komando laut, menguasai dan mengontrol komunikasi maritim, serta melakukan pengamatan akan kapabilitas kekuatan militer musuh.

Dalam pertahanan menangkal serangan hibrida LCS, yang direkomendasikan dalam

tulisan ini adalah dengan menggunakan strategi perang semesta yang melibatkan seluruh komponen sumber daya yang dimiliki. Menentukan jenis ancaman berdasarkan MPESI kemudian menyusun kekuatannya berdasarkan K/L terkait dan menyusun komponen utamanya.

Strategi maritim yang dibuat ini hanya akan memberikan daya tangkal dan pertahanan yang bersifat sementara tergantung eskalasi yang berkembang. Absennya penggunaan kekuatan militer dan nuklir memungkinkan strategi ini akan berjalan dengan baik untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI di tengah kontestasi perang hibrida Laut China Selatan.

## Daftar Pustaka

- ABC. "South China Sea dispute: John Kerry says US will not accept restrictions on movements in the sea", 7 Agustus 2015, <https://www.abc.net.au/news/2015-08-06/kerry-says-us-will-not-accept-restrictions-in-south-china-sea/6679060?nw=0>, diakses pada 11 Juni 2020.
- Ahyar, A. "Parade Dongfeng 41, Senjata Nuklir China Paling Ditakuti AS", 6 Oktober 2019, <https://akuratnews.com/parade-dongfeng-41-senjata-nuklir-china-paling-ditakuti-as/>, diakses pada 13 Maret 2020.
- AMTI. "China Risks Flare-up Over Malaysian, Vietnamese Gas Resources", 13 Desember 2019, <https://amti.csis.org/china-risks-flare-up-over-malaysian-vietnamese-gas-resources/>, diakses pada 3 Februari 2020.
- BBC. "Kapal ikan asing masuk Natuna: Indonesia protes keras ke Beijing dan kapal Vietnam baru saja ditangkap", 30 Desember 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50925653>, diakses pada 9 Maret 2020.
- BPS RI. Statistik Perdagangan Luar Negeri Foreign Trade Statistical Buletin Ekspor-Import. Jakarta: Pt Citra Mawana Patamaro, 2019.
- Castro, R.C.D. "Duterte's Decision To Scrap The Vfa: Whimsical Or Insidious?", 11 Februari 2020, <https://amti.csis.org/dutertes-decision-to-scrap-the-vfa-whimsical-or-insidious/>, diakses pada 10 Maret 2020.
- Chinh, G. "Vietnam repels Chinese-flagged vessels for illegally fishing in its waters", 9 April 2019, <https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-repels-chinese-flagged-vessels-for-illegally-fishing-in-its-waters-3906574.html>, diakses pada 10 Maret 2020.
- Citradi, T. "Harga Bawang Putih Impor Terbang, Gegara Corona?", 17 Februari 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200217153948-4-138432/harga-bawang-putih-impor-terbang-gegara-corona>, diakses pada 4 April 2020.
- Clausewitz, C.V. *The Strategic Collection: The Art of War, On War, The Prince*. New Jersey: Princeton University Press, 1989.
- Cobus, P. "Konflik dan Diplomasi di Laut, Voice of America", 2019, <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>, diakses pada 8 Maret 2020.
- Corbett, J.S. *Principle of Maritime Strategy*. New York: Dover Publications Inc, 2004.
- Cordesman, Anthony H, et al., *Chinese Military Modernization and Force Development: A Western Perspective*. Washington: The Center for Strategic and International Studies, 2013.
- CSIS. "Confirming the Chinese Flotilla Near Thitu Island", 17 Agustus 2017, <https://amti.csis.org/confirming-chinese-flotilla-near-thitu-island/>, diakses pada 7 Maret 2020.
- CSIS. "Signaling Sovereignty: Chinese Patrols At Contested Reef", 26 September 2019, <https://amti.csis.org/signaling-sovereignty-chinese-patrols-at-contested-reefs/>, diakses pada 7 Maret 2020.
- CSIS. "Updated: Vietnam Responds With Spratly Air Upgrades", 15 November 2016, <https://amti.csis.org/vietnam-responds/>, diakses pada 7 Maret 2020.
- CSIS/AMTI Digital Globe. "Update: China's Continuing Reclamation In The Paracels", 9 Agustus 2017, <https://amti.csis.org/paracels-beijings-other-buildup/>, diakses pada 7 Maret 2020.
- Edwards, A.J.C. *Nuclear Weapons, The Balance of Terror, The Quest for Peace*. New York: State University of New York Press, 1986.
- Enlai, Z. *Zhou Enlai's Selected Works on Diplomacy*. Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 1990.
- G-20. *The Group Of Twenty: A History*. South Africa: Western cape, 2007.
- Ganewati, W. "Masa Depan ASEAN: Tantangan dan Peran Indonesia", dalam Lidya Christin Sinaga, Khanisa, Faudzan Farhana, dan

- Pandu Prayoga (eds.). *50 Tahun ASEAN: Dinamika dan Tantangan Ke Depan*, Jakarta: LIPI Press, 2019.
- Gewirtz, P. *Limits of Law in the South China Sea*, East Asia Policy Paper 8. Washington, D.C: Brookings, 2016.
- GFP. “2020 Military Strength Ranking”, 1 Januari 2020, <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp>, diakses pada 12 Maret 2020.
- Gideon, A. “Menteri Susi Kembali Tenggelamkan 13 Kapal Asing Pencuri Ikan”, 12 Mei 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3963901/menteri-susi-kembali-tenggelamkan-13-kapal-asing-pencuri-ikan>, diakses pada 10 Maret 2020.
- Gutierrez, J, Gibbons-Neff, T. Schmitt, E. “Philippines Tells U.S. It Will End Military Cooperation Deal”, 11 Februari 2020, <https://www.nytimes.com/2020/02/11/world/asia/philippines-united-states-duterte.html>, diakses pada Minggu 8 Maret 2020.
- Hannah, B. “China’s Sea Control Is a Done Deal, ‘Short of War With the U.S’”, 20 September 2018, <https://www.nytimes.com/2018/09/20/world/asia/south-china-sea-navy.html>, diakses pada 5 April 2020.
- Hasan, R.A. “Menhan AS: Kami Siap Bantu RI di Laut China Selatan dan Natuna”, 23 Januari 2018, <https://www.liputan6.com/global/read/3235768/menhan-as-kami-siap-bantu-ri-di-laut-china-selatan-dan-natuna>, diakses pada 8 Maret 2020.
- Jennings, R. “China-Vietnam Maritime Standoff: 3 Scenarios for the Next Stage”, 23 Agustus 2019, <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/china-vietnam-maritime-standoff-3-scenarios-next-stage>, diakses pada 10 Maret 2020.
- Joshi, M. “Vietnam Will Never be for India What Pakistan is to China”, 3 September 2016, <https://thewire.in/63871/vietnam-will-never-india-pakistan-china/>, diakses pada 8 Maret 2020.
- Kang, D.C. *China Rising: Peace, Power, and Order in East Asia*. New York: Columbia, 2007.
- Karunia, A.M. “Tahun Ini Pertamina Mulai Lakukan Pengeboran Minyak di Blok East Natuna”, 9 Januari 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/155624826/tahun-ini-pertamina-mulai-lakukan-engeboran-minyak-di-blok-east-natuna?page=all>, diakses pada 10 Maret 2020.
- Kembara, G. “Partnership for Peace in the South China Sea.” The CSIS Working Paper Series WPSINT – 02 (2018).
- Kemhan. *Perkembangan Lingkungan Strategis Dan Prediksi Ancaman Tahun 2008*. Jakarta: Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Analisa Lingkungan Strategis, 2008.
- Kesowo, B. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang: Pertahanan Negara*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2002.
- Kesowo, B. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang: Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004.
- Khanisa. “Pembangunan Maritim Indonesia”, dalam Khanisa. dan Farhana, F (eds.). *Keamanan Maritim ASEAN Dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2018.
- Khoury, E. “Recent Trends In The South China Sea Disputes.” *Asia Focus* no. 16 (2017).
- Laksmiana, E. “Why Indonesia’s New Natuna Base is not about Deterring China”, 25 Januari 2019, <https://amti.csis.org/indonesias-natuna-base-not-about-deterring-china/>, diakses pada 16 Maret 2020.
- Lanoszka, Alexander. “Russian Hybrid Warfare and Extended Deterrence in Eastern Europe.” *International Affairs* 92, no. 1 (2016).
- Latif, A. dan Siwage, D.N. “Asean-China Free Trade Agreement: Tantangan Dan Peluang Bagi Indonesia.” *LIPI Edisi XXVI*, no. 1 (2010).
- Mangkuto, S.W. “Bukan Cuma RI, Laut Malaysia s/d Vietnam juga diklaim China, CNBC Indonesia”, 7 Januari 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200107085224-4-128148/bukan-cuma-ri-laut-malaysia-s-d-vietnam-juga-diklaim-china>, diakses pada 8 Maret 2020.
- McCuen, John J. “Hybrid Wars.” *Military Review* vol. 88 (2008).
- Medhurst, M.J. *Cold War Rhetoric: Strategy, Metaphor, and Ideology*. East Lansing, Michigan: Michigan State University Press, 1997.
- Meidi, K. “Conflicts in the South China Sea and China-ASEAN Economic Interdependence:

- A Challenge to Cooperation.” ASEAN-Canada Working Paper Series no. 7 (2014).
- Mogato. “Philippines, Russia Sign Two Military Deals”, 25 Oktober 2017, <https://de.reuters.com/article/us-philippines-russia-defence/philippines-russia-sign-two-military-deals-idUSKBN1CU1K6>, diakses pada 8 Maret 2020.
- MPR RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.
- Nemeth, W.J. .Future War and Chechnya: A Case for Hybrid Warfare. California: Naval Postgraduate School Monterey, 2002.
- Nugroho, A. “Ikan dan Migas Berlimpah, Laut Natuna Jadi Rebutan China dan Indonesia”, 9 Januari 2020, <https://www.kompas.tv/article/62327/produksi-ikan-dan-migas-berlimpah-natuna-jadi-daya-tarik-asing>, diakses pada 10 Maret 2020.
- Nugroho, R.S. “Sejak Kapan Nelayan Asin Marak Curi Ikan di Laut Indonesia?”, 4 Januari 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/114356265/sejak-kapan-nelayan-asing-marak-curi-ikan-di-laut-indonesia?page=all>, diakses pada 9 Maret 2020.
- Nurweli, I. “Peri Laut: Kembalikan Kejayaan Laut Nusantara”, dalam Nurhayati, U. Nurweli, I. Pasaribu, R.H. dan Puspa, F (eds.). *Mina Bahari: Illegal Fishing No More...! Komitmen Serius Pemerintah Perangi Illegal Fishing*. Jakarta: Pusdatin Sekjen KKP, 2015.
- Office Of The Secretary Of Defense. Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China. Washington: Department of Defense, 2019.
- Parameswaran, P. “The Limits of Duterte’s US-China Rebalance”, 24 Oktober 2016, <http://thediplomat.com/2016/10/the-limits-of-dutertes-us-china-rebalance/>, diakses pada minggu 8 Maret 2020.
- Patrick, J.C., dan Erik, R.K. MCDC Countering Hybrid Warfare Project: Understanding Hybrid Warfare. Norway: MOD, 2017.
- Permanent Court of Arbitration. “The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People’s Republic of China)”, 2016, <https://pca-cpa.org/en/cases/7/>, diakses pada 16 Maret 2020.
- Quang, N. M. “Saving the China-ASEAN South China Sea Code of Conduct”, 29 Juni 2019, <https://thediplomat.com/2019/06/saving-the-china-asean-south-china-sea-code-of-conduct/>, diakses pada 8 Maret 2020.
- Ratna , S.I. “Dinamika Hubungan Ekonomi Asean-China”, dalam Sinaga, L.C (eds.). *Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara*. Jakarta: LIPI Press, 2013.
- Reed, J. “South China Sea: Fishing on the front line of Beijing’s ambitions”, 24 Januari 2019, <https://www.ft.com/content/fead89da-1a4e-11e9-9e64-d150b3105d21>, diakses pada 9 Maret 2020.
- Reuters. “Indonesia and Vietnam vessels collide in South China Sea, 12 detained”, 29 April 2019, <https://www.abc.net.au/news/2019-04-30/indonesia-and-vietnam-ships-collide-in-south-china-sea/11056752>, diakses pada 5 April 2020.
- Revere, E.J.R. “U.S. Interests and Strategic Goals in East Asia and the Pacific, Archive US Department of State”, 2 Maret 2005, <https://2001-2009.state.gov/p/eap/rls/rm/2005/42900.htm>, diakses pada 8 Maret 2020.
- Robles, R. “Officials from Philippines, China to meet on stalled South China Sea joint oil exploration deal: senator”, 7 Januari 2020, <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3045050/officials-philippines-china-meet-stalled-south-china-sea-joint>, diakses pada 3 April 2020.
- Sambhi, A.N. “Legacies, Lessons And Lobsters: Indonesia’s Maritime Policy In A Post-Susi World”, 15 Januari 2020, <https://amti.csis.org/legacies-lessons-and-lobsters-indonesias-maritime-policy-in-a-post-susi-world/>, diakses pada 10 Maret 2020.
- Stashwick, S. “Argument: China’s South China Sea Militarization Has Peaked”, 19 Agustus 2019, <https://foreignpolicy.com/2019/08/19/chinas-south-china-sea-militarization-has-peaked/>, diakses pada 11 Maret 2020.
- The State Council Information Office of the People’s Republic of China. China’s National Defense in the New Era. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2019.
- Toto, S. “Diskusi Panel Serial (DPS) bertajuk: Pertahanan Non Militer”. Narasumber diskusi yang diprakarsai Forum Komunikasi

- Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI), Jakarta, 2016.
- United Nation. "Part V: Exclusive Economic Zone", dalam UNCLOS, Montego Bay, Jamaica: UN, 1982.
- US Department of Defense. Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense. Washington: The Secretary of Defense, 2012.
- Valencia, M.J. "The ASEAN Summits and the South China Sea", 31 Juli 2017, <https://thediplomat.com/2017/07/the-asean-summits-and-the-south-china-sea/>, diakses pada 10 Maret 2020.
- Williams, I. dan Dahlgren, M. *More Than Missiles: China Prepares its New Way of War*. Washington: CSIS Briefs, 2019.
- Woo, W.T. "What are the legitimate worries about China's WTO membership?", dalam Song, L (eds.). *Dilemmas of China's Growth in the Twenty-First Century*. Canberra: ANU E Press, 2012.
- Yunus, S. "Penyeimbang' di Laut China Selatan", 28 November 2011, <https://majalah.tempo.co/read/internasional/138350/penyeimbang-di-laut-cina-selatan?>, diakses pada 9 Maret 2020.
- Yusiantoro, P. Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama. Jakarta: Permenhan, 2012.

## TENTANG PENULIS

### **M. Bahtiar Fajri**

Penulis merupakan alumnus Universitas Pertahanan yang saat ini sedang bekerja sebagai pengajar di Yayasan Darul Fikri Sidoarjo. Penulis dapat dihubungi melalui: 10020084024. fajri@gmail.com

### **Alfin Febrian Basundoro**

Penulis merupakan mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Tertarik dengan Studi Politik dan Keamanan Global sebagai fokus studinya, saat ini, penulis aktif dalam sejumlah organisasi mahasiswa berbasis *think-tank*, di antaranya Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) *chapter* Universitas Gadjah Mada dan Unit Penalaran Ilmiah Interdisipliner (UPII) Universitas Gadjah Mada. Penulis dapat dihubungi melalui surel: alfinfb@gmail.com.

### **Petrus Kanisius Siga Tage**

Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ners Universitas Citra Bangsa Kupang. Saat ini aktif mengajar mata kuliah Manajemen Keperawatan, Filsafat Keperawatan, dan Metodologi Penelitian Kualitatif Keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui email: petruskanisiusigatage@ucb.ac.id

### **M. Hamdan Basyar**

Penulis merupakan Peneliti Ahli Utama pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Kajian utamanya adalah Agama dan Politik, Dunia Islam, dan Masalah Timur Tengah. Dia juga Dosen Pasca Sarjana Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia (2002-sekarang).

Dia pernah meneliti berbagai masalah sosial, budaya, dan politik di berbagai tempat di Indonesia, hampir semua wilayah: dari Aceh sampai Papua.

Selain itu, dia juga pernah meneliti/seminar di luar negeri, yaitu: di Yordania (1995), Mesir (1995), Turki (1996), Belanda (1996), Inggris (1996), Singapore (2004), Malaysia (2004, 2014), Australia (2005), Iran (2008), Lebanon (2016), Arab Saudi (2017), Tunisia (2018), dan Qatar (2019). Penulis dapat dihubungi melalui email: hbasyar@gmail.com

### **Putri Ariza Kristimanta**

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Meraih gelar S1 dari Universitas Indonesia dan S2 dari Universitas Pertahanan. Bergabung sebagai peneliti dalam Tim Reformasi Sektor Keamanan LIPI sejak 2018. Secara luas, memiliki minat kajian seputar studi perdamaian dan konflik. Penulis dapat dihubungi melalui email: putr018@lipi.go.id

### **Khanisa**

Peneliti Muda pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Memegang gelar S1 dari Universitas Gadjah Mada dan S2 dari Australian National University. Tergabung dalam Tim Kajian ASEAN P2P LIPI sejak 2011. Khanisa memiliki ketertarikan pada kajian Politik Internasional, Regionalisme dan Asia Tenggara. Penulis dapat dihubungi melalui email: khanisa.krisman@gmail.com

### **Lidya Christin Sinaga**

Peneliti Madya pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Meraih gelar S1 dari Universitas Gadjah Mada dan S2 dari Flinders University, Australia. Tergabung dalam Tim Kajian ASEAN P2P LIPI sejak 2008 dan Tim Kajian Etnik Tionghoa sejak 2018. Lidya memiliki ketertarikan pada kajian ASEAN, Hubungan Indonesia-Tiongkok, dan Etnik Tionghoa di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: lidya.bosua@gmail.com

### **Indriana Kartini**

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2003 hingga saat ini. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjajaran pada tahun 2002. Gelar Master of International Politics diraih dari the University of Melbourne, Australia pada tahun 2008. Selain aktif tergabung dalam Tim Penelitian Perbatasan P2 Politik LIPI, penulis saat ini juga sedang menempuh Pendidikan S3 di Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: [indriana.kartini@gmail.com](mailto:indriana.kartini@gmail.com)

### **Defbry Margiansyah**

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan sarjana dari program studi Hubungan Internasional di Universitas Pasundan dan magister dari Global Studies Programme di Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Minat kajian difokuskan pada tema dan isu seputar ekonomi politik global, teknologi, demokrasi, dan sosiologi politik internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: [defbry@yahoo.com](mailto:defbry@yahoo.com) / [defbry@gmail.com](mailto:defbry@gmail.com)

